

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas demokrasi suatu negara ditentukan oleh kualitas partai politik yang merupakan representasi rakyat di dalam suatu sistem perwakilan. Sebagai pusat rekrutmen serta media sirkulasi elit politik di suatu negara, partai politik memiliki peran yang fundamental dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pada awal kemunculannya, partai politik ditujukan sebagai sarana rakyat untuk masuk ke lingkaran kekuasaan atau pada suatu sistem politik.¹

Partai politik juga memiliki ideologi dan tujuan organisasi yang terdapat dalam manifesto masing-masing partai politik. Dalam sistem demokrasi, ideologi akan *dibreakdown* dalam manifesto partai dan program partai akan menjadi sikap dasar partai dalam menjalankan proses pengelolaan kebijakan negara.² Intinya, ideologi dijadikan sebagai pedoman perumusan kebijakan di parlemen, corak aktivitas partai, dan juga sebagai ciri khas pembeda suatu partai dengan partai lain untuk menarik simpati rakyat.

Partai politik di Indonesia, dari dulu sampai sekarang, erat kaitannya sebagai alat perjuangan rakyat.³ Menurut Miriam Budiardjo secara umum dapat dikatakan bahwa

¹ Asal-usul partai politik dijelaskan dalam beberapa pendekatan yaitu, pendekatan institusional, pendekatan historis, dan pendekatan modernisasi. Dalam pendekatan modernisasi, dikatakan kelompok-kelompok sosial baru mencari akses yang lebih langsung untuk masuk ke dalam proses politik sebagai dampak dari terjadinya peningkatan dalam hal aliran informasi, ekspansi pasar-pasar internal, pertumbuhan teknologi, ekspansi jaringan transportasi dan yang terpenting adalah karena terjadinya peningkatan mobilitas spasial maupun sosial. Masyarakat modern adalah masyarakat massa dan dengan demikian masyarakat itu membutuhkan suatu institusi untuk mengorganisasikan inklusi dan integrasi publik massa ke dalam sistem. Lihat di Laplambara, Joseph dan Jeffrey Anderson, *Political Parties dalam Pamungkas, Sigit. Partai Politik. 2011. Teori dan Praktik di Indonesia. Institute For Democracy and Welfarism: Yogyakarta.* Hal. 20.

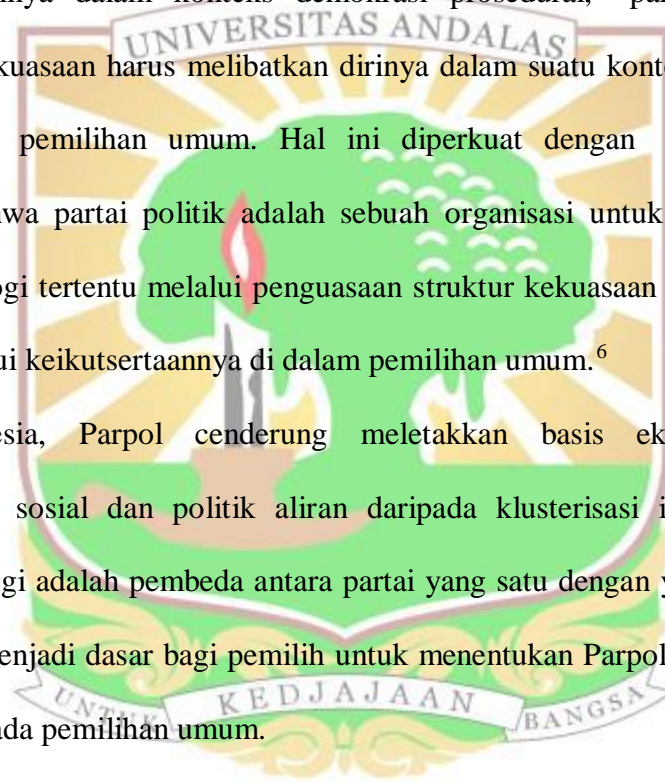
² Sugiono, Muhadi. 2009. *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009.* Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: UGM, Hal. 3.

³ Menurut Firman Noor dalam kajian reflektifnya yang berjudul *Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik* menyebutkan bahwa sejarah

partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁴

Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa meskipun mempunyai corak yang beragam dan cara mencapai tujuan yang berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya, namun mereka tetap memiliki muara yang sama yaitu kekuasaan. Artinya dalam konteks demokrasi prosedural,⁵ partai politik untuk memperoleh kekuasaan harus melibatkan dirinya dalam suatu kontestasi politik yang disebut dengan pemilihan umum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sigit Pamungkas bahwa partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.⁶

Di Indonesia, Parpol cenderung meletakkan basis eksistensinya pada pengelompokan sosial dan politik aliran daripada klusterisasi ideologis.⁷ Secara normatif, ideologi adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Hal itu juga yang menjadi dasar bagi pemilih untuk menentukan Parpol pilihannya ketika berpartisipasi pada pemilihan umum.



sesungguhnya mencatat bahwa partai politik di Indonesia pada awal berdirinya bangsa ini merupakan institusi yang akrab dengan amanat penderitaan rakyat dan tidak membatasi dirinya hanya untuk mengurus hal-hal seperti *power an-sich*. Partai politik saat itu dibangun atas kesadaran besar untuk mengefektifkan perjuangan hak politik, keseimbangan distribusi ekonomi, dan keadilan sosial, tanpa harus membuat tembok tinggi antara mereka dengan rakyat. Lihat misalnya di Noor, Firman. 2007. Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No. 1. Hal. 52.

⁴ Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 403.

⁵ Demokrasi prosedural merupakan sebuah upaya yang menerjemahkan demokrasi substansial ke dalam bentuk baku, seperti pemilihan umum. Lihat di Noor, Munawar. 2018. Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial. *Mimbar Administrasi*. Vol. 2, no. 1. Hal. 80.

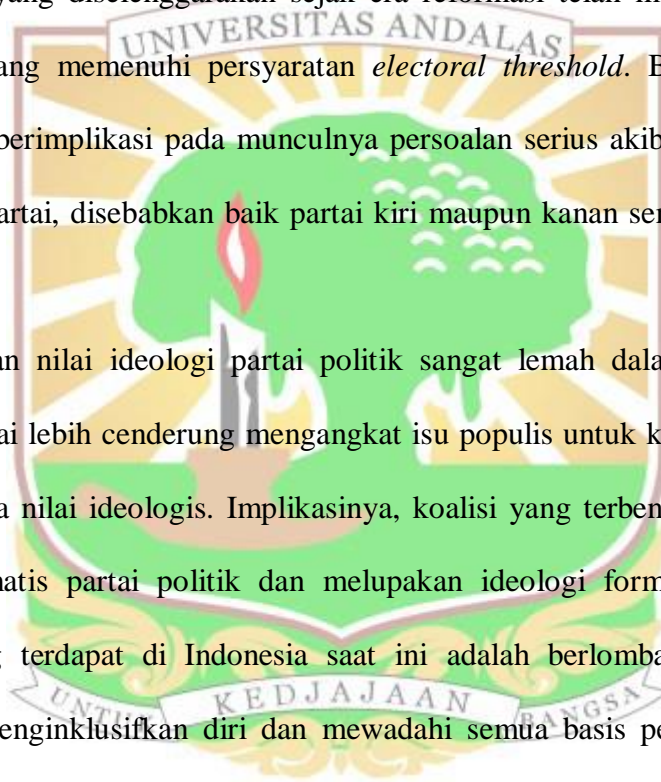
⁶ Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism. Hal. 5.

⁷ Dhakidae, Daniel. 1999. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Dalam tim Litbang Kompas, Edisi Pemilihan Umum. Jakarta: Litbang Kompas

Permasalahannya adalah terjadi pelemahan ideologi yang membedakan Parpol di Indonesia. Bahkan terkesan Parpol di Indonesia seakan-akan tidak memiliki ideologi sama sekali. Lemahnya fungsi ideologi ini bisa dilacak pada rezim orde baru yang tidak membolehkan partai politik memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.⁸

Sejak pemilu tahun 2004 dan sepanjang pelaksanaan pemilu pada tahun 2005-2009, posisi ideologi politik sebuah Parpol sepertinya tidak memiliki arti apa-apa. Sistem pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold*. Banyaknya jumlah partai tersebut, berimplikasi pada munculnya persoalan serius akibat kaburnya batas ideologi antar partai, disebabkan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah.⁹

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai politik untuk menginkluskikan diri dan mewedahi semua basis pemilih, sedangkan



⁸ Pada tahun 1973 Partai politik kemudian melakukan fusi sebagai dampak dari stabilitasi politik oleh rezim orde baru yang kemudian menyisakan tiga kelompok yaitu, Islam (PPP), nasionalis (PDI), dan karya (Golkar). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII); Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI); Golongan Karya (Golkar). Lihat misalnya di Hidayat, Arief. 2018. Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Mimbar Demokrasi*. Vol. 17, No. 2. Hal. 161.

⁹ Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru"*. Jakarta: Kencana.

ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai.¹⁰ Aspinnal (2014) menjelaskan:

“Indonesia’s parties differ little on policy matters (except, to some extent, on the place of religion in national life). The typical left-right cleavage that commonly structures political competition elsewhere is largely absent. All the parties are economically nationalist (although in 2014 Gerindra was especially aggressive in this regard), and they all basically support the current democratic system (though, again, Gerindra is a partial outlier, with Prabowo calling for a return to the presidentialist 1945 Constitution). As a result, no single policy issue prompted vigorous debate among party leaders during the election campaign.”¹¹

Menurut terjemahan bebas penulis:

“Partai politik di Indonesia sulit dibedakan secara kebijakan (kecuali, dalam hal perbedaan terhadap agama dalam kehidupan nasional). Tipikal perbedaan ideologi kanan-kiri yang biasanya lumrah dalam struktur politik di negara manapun nyaris tidak ditemukan di Indonesia. Semua partai politik di Indonesia secara ekonomi mereka adalah nasionalis (Gerindra sangat agresif dalam hal ini), dan pada dasarnya partai-partai tersebut mendukung sistem demokrasi yang ada. Yang pada akhirnya menyebabkan tidak ada satupun perdebatan yang serius di antara partai-partai politik mengenai isu terhadap kebijakan selama masa kampanye.”

Kesulitan membedakan partai-partai di Indonesia dalam hal kebijakan dan ideologi ini merupakan konsekuensi dari produk koalisi pelangi (*rainbow coalitions*) yang selama ini dilakukan oleh partai-partai besar di dalam kabinet setelah rezim Soeharto tumbang.¹² Kaburnya batas ideologi antar partai semakin memperjauh jarak antara partai dengan rakyat. Hal ini ditandai dengan ada penurunan yang sangat tajam dalam hal proporsi penduduk yang terindikasi dengan partai politik manapun.

¹⁰ Simbolon, Parakitri T. 2006. Menjadi Indonesia, dalam Bariroh, Laili. 2014. Positioning Ideologi Partai Politik Pada Preferensi Politik Santri. *Jurnal Review Politik*. Vol. 04, No. 01. Hal.. 135.

¹¹ Aspinnal, Edward. 2014. Indonesia’s 2014 Elections: Parliament and Patronage, *Jurnal of Democracy*. Vol. 25, No. 4. Hal. 100.

¹² Ibid. Hal 105

Survei menunjukkan suatu penurunan yang dramatis, dengan 86 persen pemilih mengatakan bahwa mereka “dekat” dengan partai tertentu pada tahun 1999, lalu jumlah tersebut tenggelam menjadi hanya 15 persen pada tahun 2014.¹³ Rendahnya kepercayaan pemilih ini disebabkan oleh berbagai hal, tapi yang paling mencolok adalah karena pemilih kecewa dengan perilaku elit-elit partai yang menggunakan partai sebagai alat hisap sumberdaya negara untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Selain itu, lemahnya fungsi ideologi partai juga menyebabkan menurunnya kepercayaan pemilih. Partai dengan ideologi yang kuat tentu akan mendengarkan aspirasi pemilihnya lalu memperjuangkannya di parlemen ketimbang memperkaya diri sendiri dengan cara mengkorupsi sumberdaya negara. Hal ini ditandai dengan menurunnya perolehan suara oleh partai-partai dengan corak ideologi yang khas seperti partai politik bercorak islamis, dan nasionalis seperti PDI Perjuangan. Data menunjukkan pada pemilihan umum legislatif pertama pasca reformasi di tahun 1999, partai politik yang memobilisasikan daya tarik berbasis sosio-religius, etnik, atau kesamaan identitas berhasil memenangkan suara sebesar 75 persen. Pada Tahun 2014, total capaian suara mereka menurun menjadi 50 persen.¹⁴

Pada Tahun 2019 diselenggarakan pemilihan umum serentak¹⁵ yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilu serentak 2019 diikuti oleh 19 dengan

¹³ Muhtadi, Burhanuddin. 2018. Buying Votes In Indonesia Partisans, Personal Networks, And Winning Margins. *The Australian National University*. no. 18.

¹⁴ Aspinall, Edward and Berenschot, Ward. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 103.

¹⁵ Pemilu serentak adalah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan dalam satu waktu. Dalam Pemilihan Legislatif masyarakat memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013, peraih gelar Ph.D., dalam bidang komunikasi politik dari Radboud Nijmegen University Belanda ini menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) untuk UU yang digugat Effendi Ghazali tersebut pada Mei 2013 kendati baru resmi disidangkan pada Januari 2014. Lihat di “*Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia*”, Iswara N Raditya, 22 April 2019, Tirto.id dalam <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm> diakses pada 24 Februari 2021

keterangan 16 partai nasional dan 3 partai lokal (Aceh). Lihat Partai politik peserta pemilu 2019 di tabel berikut :

Tabel 1. 1
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Beserta Perolehan Suaranya

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Tahun 2019 di Indonesia
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9,69 %
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12,57 %
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	19,33%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	12,31%
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	9,05%
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0,50 %
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2,09 %
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8,21 %
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2,67 %
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4,52 %
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1,89 %
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	6,84 %
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1,54 %
14	Partai Demokrat (Demokrat)	7,77 %
18	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0,22 %
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	0,79 %

Sumber data sekunder diolah peneliti melalui: www.kpu.go.id Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi pemenang pemilu serentak 2019 dengan perolehan suara sebesar 19,33% selisih angka sebanyak 6,76% dari pesaing terdekatnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Adapun dari 16 partai yang bersaing secara nasional, hanya sebanyak 9 partai yang lolos ke parlemen sedangkan 7 partai lainnya harus berbesar hati karena terganjal oleh ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% dari 575 total kursi di DPR RI.

Kemenangan PDI-P di pemilu tersebut juga diikuti oleh kemenangan pasangan Jokowi-Maaruf Amin yang diusung oleh PDI-P bersama delapan partai lainnya yang

tergabung di dalam Koalisi Indonesia Kerja¹⁶. Sedangkan lawannya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh koalisi Indonesia Adil Makmur yang dikomandoi oleh partai Gerindra bersama empat partai lainnya.¹⁷

Idealnya dalam negara demokrasi, partai atau koalisi pemenang pemilu menjadi penguasa sekaligus menjalankan pemerintahan dan partai yang kalah menjadi oposisi, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pihak penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya.¹⁸ Namun di Indonesia tidak demikian, Gerindra yang diketuai oleh Prabowo yang merupakan lawan Jokowi-Amin di pemilihan presiden memilih untuk bergabung ke koalisi pemenang pemilu. Prabowo, Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo, mendapatkan jatah kursi menteri sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Fakta ini menimbulkan asumsi bahwa partai mengabaikan ideologi sekaligus mengecewakan pendukungnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ilmuwan politik seperti Dan Slater dan Kuskridho Ambardi dalam Aspinnal (2018), bahwa politik Indonesia didominasi oleh "kartel¹⁹" partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (*spoils of office*) alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.²⁰ Partai dianggap tidak lagi mewakili kepentingan konstituennya di parlemen, tetapi lebih mengutamakan program yang berifat

¹⁶ Ada sembilan parpol yang mendukung Jokowi di pilpres 2019, di antaranya PDIP, PKB, Gokkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.

¹⁷ Koalisi Indonesia Adil Makmur diisi oleh Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya.

¹⁸ Lihat artikel Firman Noor Yang mengemukakan bahwa oposisi sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Perlu adanya kekuatan di luar pemerintahan yang dapat turut menjaga bahwa kedaulatan rakyat itu tetap ada dan berfungsi. Dalam konteks inilah peran mereka yang berada di luar pemerintahan atau oposisi menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan pemerintahan yang sedang berjalan tetap berada di rel kepentingan rakyat. Firman Noor. 2016. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*. Vol, 42, no. 1: 1-17.

¹⁹ Situasi di mana partai politik melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan programatis mereka demi sesuatu yang lain.

²⁰ Edward Aspinnal et al., "Mapping Indonesian Political Spectrum," *New Mandala*, no. May 2020 (2018), <https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/>.

pragmatis daripada memilih untuk mengikuti nilai-nilai ideologis yang menjadi pedoman partai. Hal ini yang kemudian membuat rakyat atau pemilih skeptis terhadap partai politik, dan hal ini juga yang melanggengkan demokrasi patronase di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari berbagai penelitian terdahulu tentang ideologi dan partai politik. Penelitian Yeby Ma'asan Masyrudin dalam artikelnya yang berjudul *Dinamika Partai Politik dan Positioning ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014*.²¹ Penelitian tersebut berusaha menjawab bagaimana peta ideologi partai politik peserta pemilu 2014 dan bagaimana gambaran pergeseran ideologinya. Penelitian terhadap ideologi dan partai yang terbaru dan komprehensif dilakukan oleh Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati, dan Eve Warburton (Lembaga Survei Indonesia dan Australian National University), yang berjudul "*Mapping Indonesian Political Spectrum*" pada tahun 2018.²² Penelitian tersebut memetakan ideologi partai politik di Indonesia berdasarkan persepsi dari elit partai mereka..

Penelitian secara kuantitatif tentang persepsi ideologi partai politik Indonesia memang termasuk baru. Sejauh ini belum ada penelitian terhadap ideologi partai politik dan melakukan pemetaan berdasarkan persepsi pemilih, padahal pemilih merupakan elemen penting yang menentukan eksistensi partai politik selama ini. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini daripada penelitian sebelumnya.

Berkaca pada konteks dinamika politik hari ini, sangat penting untuk mengetahui tentang bagaimana ideologi partai politik dipersepsikan oleh pemilih kemudian berdasarkan persepsi tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pemilih dalam memetakan ideologi partai politik peserta pemilu. Hal ini berguna untuk

²¹ Yeby Ma'asan Masyrudin. 2017. *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. *Journal of Governance* 2. No. 2. Hal, 163–185.

²² Edward Aspinall et al., "Mapping Indonesian Political Spectrum."

memeriksa apakah perbincangan terhadap ideologi masih menjadi arus utama di akar rumput sehingga didapatkan data yang komprehensif tentang persepsi dan pemetaan partai politik berdasarkan ideologinya oleh pemilih Kota Padang tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu ini mampu meraih partisipasi pemilih sebanyak 81%. Dengan angka partisipasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilu serentak ini cukup sukses dalam mendulang suara pemilih dari kacamata demokrasi prosedural.

Partai politik peserta pemilu di Kota Padang tahun 2019 terdiri dari 16 partai. Masing-masing dari 16 partai tersebut memperebutkan 45 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 di kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2
Data Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Padang

No	Nama Partai	Akronim	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	11
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP	3
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	3
5	Partai Nasdem	NasDem	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indoensia	GARUDA	0
7	Partai Berkarya	BERKARYA	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	9
9	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	3
11	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	0
12	Partai Amanat Nasional	PAN	7
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	0
14	Partai Demokrat	DEMOKRAT	6
15	Partai Bulan Bintang	PBB	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI	0

Sumber data sekunder diolah peneliti berdasarkan KPU Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai jumlah perolehan kursi Parpol di Kota padang, dapat disimpulkan dari 16 Parpol peserta pemilu, hanya 9 partai yang lolos untuk

menempati 45 kursi Anggota DPRD kota Padang Tahun 2019. Posisi pertama ditempati oleh Partai Gerindra dengan perolehan 11 kursi, posisi kedua ditempati oleh PKS dengan perolehan 9 kursi, selanjutnya disusul oleh PAN sebanyak 7 kursi, dan posisi keempat ditempati oleh Partai Demokrat sebanyak 6 kursi. PDIP, PPP, dan Golkar sama-sama memperoleh 3 kursi. Sementara yang mengejutkan adalah Partai Berkarya sebagai partai baru mampu mendapatkan 2 kursi, mengungguli NasDem yang hanya meraih 1 kursi.

Berkaca pada data tersebut, maka pada penelitian ini, peneliti membatasi hanya 9 Parpol yang mampu lolos ke parlemen tersebut yang akan menjadi objek dari penelitian ini. Pembatasan tersebut akan memudahkan penelitian ini karena, berkaca pada hasil perolehan kursi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Padang sudah cukup mengenal atau mengetahui Parpol tersebut sehingga mengurangi bias dari hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya.

Ideologi merupakan suatu gagasan dan keyakinan yang menjadi landasan suatu kelompok. Ideologi Parpol di Indonesia tertuang dalam AD/ART setiap partai. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan *positioning* ideologinya, namun corak pembeda antara satu partai dengan partai lain masih dapat dilihat melalui azas dan jati diri yang tertulis dalam AD ART suatu partai. Untuk mengetahui ideologi 9 Parpol tersebut, lihat tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1. 3
Pemetaan Ideologi Partai Politik yang Menempati Kursi Anggota DPRD Kota Padang Tahun 2019 Berdasarkan AD ART

No	Nama Partai	Azaz	Ciri/Jati Diri	Identifikasi
1	Gerindra	Pancasila dan UUD 1945	Kebangsaan, Kerakyatan, Religius, Keadilan Sosial	<i>Catch-all Party</i>
2	PKS	Islam	Madani, Adil dan Sejahtera	Islam

3	PAN	Pancasila dan berasaskan akhlak politik berlandaskan agama	Menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan	Islam
4	Demokrat	Pancasila	Nasionalisme dan Religius	<i>Catch-all Party</i>
5	PDIP	Pancasila dan UUD 1945	Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial	Nasionalis
6	PPP	Islam	<i>Ahlussunnah Wal Jama'ah</i>	Islam
7	Golkar	Pancasila	Demokratis, Moderat, Majemuk.	<i>Catch-all Party</i>
8	Berkarya	Pancasila dan UUD 1945	Religius, Kebangsaan, Kerakyatan	<i>Catch-all Party</i>
9	Nasdem	Pancasila	Nasionalis, Kemajemukan	Nasionalis

Sumber data sekunder diolah peneliti berdasarkan AD/ART Masing-masing partai

Data pada tabel 1.3 peneliti olah berdasarkan azas, ciri, dan jati diri yang tertulis pada masing-masing dari 9 Parpol tersebut. Dari data tersebut setelah peneliti identifikasi, terdapat 2 partai yang menyatakan dirinya sebagai partai Nasionalis yaitu PDIP dan NasDem. Kemudian terdapat 3 partai islam yaitu PPP, PAN, dan PKS. Meskipun PAN menyatakan partainya berazaskan pancasila, namun di dalam mukadimah AD ART-nya, PAN menginginkan terwujudnya masyarakat madani yang dilandasi moral agama yang bersumber dari iman dan takwa. Karena itulah peneliti mengidentifikasi PAN termasuk sebagai partai islam.

Identifikasi selanjutnya, terdapat 4 partai yang peneliti sebut sebagai *catch-all party*. Menurut Otto Kircheimer dalam Budiardjo (2008), partai *catch-all party* adalah partai yang ingin menghimpun semaksimal mungkin dukungan dari bermacam-macam kelompok masyarakat dan dengan sendirinya menjadi lebih inklusif.²³ Empat partai tersebut adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, dan Berkarya. Disebut *catch-all party* karena 4 Parpol tersebut dalam AD ART nya menyatakan bahwa mereka

²³ Op.cit. Hal. 402.

berusaha untuk mewadahi semua golongan, baik itu kaum nasionalis maupun kaum islam.

Temuan menarik lainnya adalah dari 9 Parpol yang mendapatkan kursi di pemilu legislatif Kota Padang tahun 2019, 4 di antaranya adalah Parpol yang bercorak *catch-all party*. Bahkan Parpol dengan corak ideologi ini mampu mendapatkan raihan suara dan raihan kursi terbanyak di parlemen Kota Padang, yaitu Partai Gerindra. Ideologi ini juga mengungguli partai islam dan partai nasionalis. Padahal secara demografi, masyarakat kota Padang mayoritas beragama islam dan menjunjung tinggi falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Lihat tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1. 4
Data Jumlah Pemeluk Agama Di kota Padang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	838.565
2	Kristen Katolik	11.712
3	Kristen Protestan	6.175
4	Budha	2.401
5	Hindu	1.015

Sumber data sekunder olahan peneliti berdasarkan BPS Kota Padang

Mendominasinya partai *catch-all party* di tengah masyarakat yang mayoritas beragama islam semakin mengukuhkan temuan bahwa sekalipun ideologi yang ditawarkan oleh Parpol dekat dengan karakteristik pemilih di suatu wilayah, tetap saja hal itu tidak menjamin Parpol tersebut menjadi pemenang pemilu. Dari data ini juga diketahui, bahwa strategi Parpol dalam hal menginklusifkan diri, mewadahi semua kalangan, mengaburkan *positioning* ideologi, dan tidak menawarkan program berbasis ideologi, dapat dikatakan berhasil.

Hal ini kemudian membuktikan pernyataan Edward Aspinnall yang terdapat pada latar belakang penelitian ini, bahwa partai Indonesia sulit dibedakan berdasarkan kebijakan dan tidak adanya pembedaan mana partai kanan dan mana partai kiri di Indonesia yang mana hal tersebut lumrah di struktur kompetisi politik manapun

adalah karena partai politik Indonesia lebih mementingkan hasil perolehan suara di pemilu dengan cara menjadi partai yang bisa masuk ke semua kalangan.

Peneliti berasumsi bahwa meskipun ideologi partai politik di Indonesia sulit untuk dibedakan antara satu partai dengan partai lainnya, namun menurut peneliti pemilih Kota Padang sudah memiliki persepsi tersendiri terhadap ideologi partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2019 yang didasari oleh pengetahuan (kognitif) dan perasaan mereka tentang ideologi, di mana persepsi tersebut kemudian menentukan perilaku mereka dalam memetakan ideologi partai politik.

Berdasarkan asumsi di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana pengaruh aspek kognitif dan emosional terhadap perilaku pemilih Kota Padang dalam memetakan ideologi partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2019?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana pengaruh aspek kognitif dan emosional terhadap perilaku pemilih Kota Padang dalam memetakan ideologi partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah:

1. Secara akademis dapat dijadikan referensi sebagai tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan ideologi partai politik, persepsi pemilih terhadap ideologi partai politik, serta pemetaan ideologi Parpol berdasarkan persepsi oleh pemilih kota Padang.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada partai politik dan elit tentang bagaimana persepsi pemilih terhadap ideologi partai.